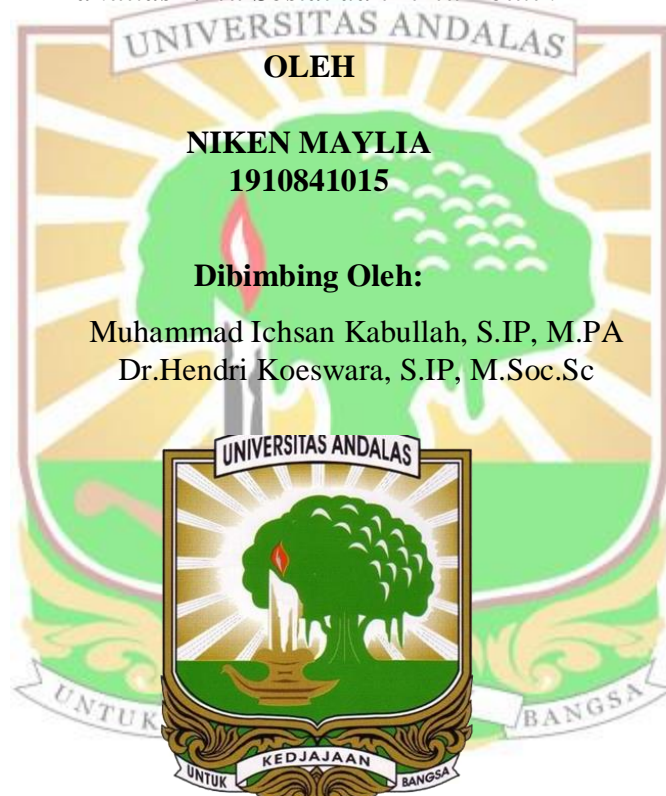


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN  
KELUARGA OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*



**OLEH**

**NIKEN MAYLIA  
1910841015**

**Dibimbing Oleh:**

Muhammad Ihsan Kabullah, S.IP, M.PA  
Dr.Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

**Niken Maylia, No BP: 1910841015, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024, Dibimbing oleh: M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA dan Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 167 halaman dengan referensi 16 buku teori, 8 buku metode, 4 skripsi, 5 jurnal, 5 peraturan dan 3 website internet**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi lima pilar ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menemukan keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari dua variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya, dan empat variabel pendukung yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga masih belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan tujuan kebijakan untuk mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan seperti masih kurang meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selanjutnya mengenai komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Dinas P3AP2KB, dikarenakan perlu adanya dukungan dari lembaga lain dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Setelah itu pada kondisi sosial dan ekonomi masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai ketahanan keluarga dan kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan perda. Pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

**Kata Kunci: DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Implementasi kebijakan, Koordinasi dan Kerjasama**

## ABSTRACT

**Niken Maylia, Student ID: 1910841015, Implementation of Regional Regulations West Sumatra Province Number 17 of 2018 Implementation of Family Resilience Development by the West Sumatra Government. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2024. Supervised by: M. Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA and Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc. This thesis consists of 167 pages with references to 16 theory books, 6 methodology books, 4 theses, 5 journals, 5 regulations and 3 internet websites.**

This research aims to describe the Implementation of West Sumatra Province Regulation Number 17 of 2018 concerning Implementation of Family Resilience Development. The implementation of Family Resilience Development is one form of government contribution to realize the quality of families ni fulfilling the five pillars of family resilience.

This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The data collection are conducted through interviews, observations, and documentation. To ensure data validity, the Researcher utilizes source triangulation. This study uses Van Meter and Van Horn's theory, which consists of two variables: policy standards and objectives and resources, and four supporting variables: characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, attitudes or tendencies of implementers, and the social, economic, and political environment.

Based on the research findings, the researcher concludes that the implementation of West Sumatra Provincial Regulation Number 17 of 2018 concerning Family Resilience Development has not been well-implemented, since the policy objective to achieve families with optimal quality has not been achieved. This can be seen from several obstacles such as uneven dissemination of information by implementers to targeted groups. Furthermore, there is still a lack of human and financial resources. Regarding to communication and coordination, they have not been fully implemented by the Office of P3AP2KB due to the need for support from other institutions in efforts to achieve family resilience. Additionally, in terms of social and economic conditions, there are lacks of awareness, knowledge, and understanding among the publics regarding to family resilience and insufficient financial resource support resulting in obstacles to the implementation of the regulation. In the political context, there is supports from political elites, but it still needs to be maximized in the implementation of Family Resilience Development.

**Keywords: DP3AP2KB West Sumatra Province, Policy Implementation, Coordination and Cooperation**